



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lana Winayanti
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

LANA WINAYANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan	95%
		2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS	94%
		3 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	94%
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS	95%
		2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	95%

Program :

- 1 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran

Rp. 248.359.063.000

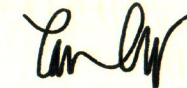
JAKARTA, JANUARI 2018

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



M. BASUKI HADIMULJONO

**Pt KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**



LANA WINAYANTI